

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Huda, Ni"matul, 2011. *Hukum Tata Negara (edisi revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 284
- Iqbal, Muhammad, 2014. "Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam", Jakarta: Kencana, Hal. 177-178
- Nurwardani, Paristiyanti, Saksama Yoga Hestu, 2016. "Pendidikan Kewarganegaraan", Jakarta: Ristekdikti, Hal. 18
- Pulungan, Suyuthi, 2014. "Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran", Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Hal. 25.
- Sailan, Manan, 2012. "Pengantar Hukum Indonesia", Makassar, hal.4
- Syamsi, Ibnu, Hartanto, 2018. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitas Dan Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: UNY Press, Hal. 17
- Usman, Husaini, Akbar Setiady Purnomo, *Metode Penelitian Sosial*, Cet: V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

SKRIPSI DAN JURNAL PENELITIAN

- Amalia, Ayu Diah, (2015), "Modal Sosial Kemiskinan Social Capital And Poverty", *Jurnal Sosio Informa*, 3 (1).
- Arif, Nasution, Marlian, (2022), *Telaah Filosofisma Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (1).
- Dewi, Karina Mutiara, Sugeng Pamudji, (2013), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketetapan Waktu dan Audit Delay Penyampaian Laporan Keuangan", *Jurnal of accounting Diponegoro*, 2 (2).
- Fachrudiansyah, Rizkan, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Renjang Lebong No. 5 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Perdagangan Kaki Lima Perspektif Siyasah Duturiyah*, Fakultas Syariah, UIN Fatmawati Sukarno, 2022.

- Harahap, Puja Amelia, Peran Bawaslu Terhadap Proses Penyelesaian Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2022.
- Herman, Andi akbar, Implementasi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari, 2011.
- Humaedi, Sahadi, Wibowo Budi, Santoso Tri Raharjo, (2018), “Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (sebuah kajian hasil pemetaan sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)” *social work jurnal*, 10 (1).
- Ibnu, Syamsi, Hartanto, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitas Dan Pekerjaan Sosial, Yogyakarta: UNY Press, 2018.
- Ishomuddin, (2020), Pemahaman Politik Islam Studi Tentang Wawasan Pengurus Dan Simpatisan Partai Politik Berasas Islam Di Malang Raya, *Jurnal Politik Islam*, 8 (2).
- Laksa, Kresna Sandhi, (2022), Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di UPTD Liponsos Keputih, PAJA Observer: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 01 (2).
- Lavan, Yohana Oktaviani, Wulan Siti S, dkk, (2021), Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Dinamika Politik Indonesia, *Jurnal Pendidikan Islam*, 09 (1).
- Maryatun, Tri Santoso Raharjo, Budi Muhammad Taftazani, (2022), Kebijakan Penanganan Gelandangan Pengemis Berbasis Panti Untuk Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13 (2).
- Nagaring, Denny David, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow, (2021), ”Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)”, *Jurnal Governance*. 1 (2).
- Ningtias, Amanda Putri, “Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepathan Hukum Warga Kota Jambi dalam

- Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.” Universitas Islam Negri Jambi, 2021.
- Nuriana, Rika, “Pemberdayaan “PMKS” (penyandang masalah kesejahteraan sosial) Lansia Terlantar di UPDTP Griya Werdha Kota Surabaya”, studi ilmu administrasi negara, FISIP, Universitas Airlangga. 2017
- Onny, Medaline, (2017),Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah, *Jurnal wakaf dan ekonomi islam*, 10 (2).
- Piran, Feliksya Weda, Adianto Mardjono, (2022),“Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Perpektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial” *journal of law and social political governance*, 1 (2).
- Pratama, Muhammad ach Anzar, (2022),Wening Mustikaningsih,”Politik Kesejahteraan; Analisa Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kondisi Triple Disruption”, *Jurnal Darma Agung*, 3 (3).
- Purwanto, Muhammad Eko, (2019), Aspek Pengubah Hukum Dalam Perspektif Budaya Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum*.
- Rahman, M. Gazali, Sahlan Tomayahu, (2020), Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Al-Himayah*, 4 (1).
- Rosaliza, Mita, (2015), wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2).
- Siti, Hawa, Hanan, Gani Jumar, dkk, (2023),Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 Tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Perspektif Fiqh Siyasa, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3 (2).
- Sukmana, Oman, (2016). “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, 1(2).
- Utami, Beta, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah, Fakultas Syari’ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Wahidin, “Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Muara Bulian”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, 2024.

Zarkasi, A, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2012.

WEBSITE

/artikel/r/pwkinternal--menyoal-kesejahteraan-sosial , diakses 14 juni 2024

?from=1&to=286, diakses 20 Oktober 2024

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/107?>

Al-Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?>

Al-Qur'an Online, Surat Al-Baqarah Ayat 155: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap Al-Qur'an, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/155> diakses 23 Juni 2024

Departemen Sosial Republik Indonesia Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, <https://www.kemosos.go.id> , 2009 diakses 14 juni 2024

Dinas Sosial Kabupaten Tangerang,, <https://dinsos.tangerangkab.go.id/profil-konten/404> , diakses 3 Oktober 2024

Dinas Sosial Kalimantan Timur, <https://dinsos.kaltimprov.go.id/mensos-ganti-penyebutan-pmks-menjadi-ppks/> , diakses pada 19 Oktober 2024

Fauziah, Lilis Balqis, <https://info.unida.ac.id/artikel/narasi-maqosid-syariah> diakses pada 19 oktober 2024

from=1&to=7, diakses 20 Oktober 2024

Hadi, Sopian, “Mwnyoal Kesejahteraan sosial” <https://www.ombudsman.go.id/>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksaan Keuangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009> diakses 7 Mei 2024

LKIP Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, laporan kinerja instansi pemerintahan, <https://dinsos.tangerangkota.go.id/assets/uploads/> , diakses 15 oktober 2024

news/sosialisasi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks, diakses pada 19 Juni 2024

page_id=107 , Diakses 26 Mei 2024

Pemerintahan sosial Kabupaten Bantul, “Sosialisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, <https://sosial.bantulkab.go.id/>

Peraturan Menteri Sosial (Permensos RI) Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia no 18 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.

Sejarah singkat di kec. Pasarkemis,
<https://pasarkemis.kwarcabtangerang.or.id/?>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat 2.

SUMBER-SUMBER LAINNYA

Abdullah, Sarwan dan Nahati Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Desa Sukamantri.

Ahmad Suryadi, Kaur Perencanaan, Perangkat Desa Sukamantri.

Endang Ramdani, Kepala Seksi Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, Dinas Sosial

Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang.

Moh. Sadeli, Kasi Kesejahteraan, Perangkat Desa Sukamantri.

Royani, Kaur Keuangan, Perangkat Desa Sukamantri.

Susilawati, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Eks. Penyakit Sosial, Dinas Sosial

Wahyuningsih, Sekretaris PKK, Organisasi Kemasyarakatan.